

**DISKRIMINASI ETNIS KURDI DI TÜRKIYE IRAK IRAN DAN SYRIA
TAHUN 1918-2024**

Ardi Tri Yuwono
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri
arditriyuwono1945@gmail.com

Abstrak - Sebelum ditetapkan batas negara Türkiye melalui Perjanjian Lausanne, Etnis Kurdi yang berasal dari wilayah Pegunungan Kurdistan menjalani gaya hidup nomaden. Oleh karena itu, Etnis Kurdi merupakan salah satu kelompok minoritas yang tersebar di negara-negara Timur Tengah, seperti: (1) Türkiye, (2) Irak, (3) Iran, dan (4) Syria. Etnis Kurdi tidak menjadi mayoritas di negara tersebut, sehingga mereka rentan mengalami diskriminasi dan genosida. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut terkait kehidupan Etnis Kurdi setelah Perang Dunia I hingga masa modern di negara Türkiye, Iran, Irak, dan Syria (1918-2024). Penelitian ini mengaplikasikan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif. Kehidupan Etnis Kurdi di negara tersebut menghadapi tantangan yang berbeda. Etnis Kurdi di Türkiye mengalami genosida pada tahun 1925-1938 dan 1984-1999. Etnis Kurdi di Irak juga mengalami genosida pada tahun 1978-1979 dan 1987-1989. Adapun Etnis Kurdi di Iran berjuang untuk mendirikan negara bagi Etnis Kurdi di wilayah barat Iran. Sementara itu, Etnis Kurdi di Syria menghadapi konflik dengan Etnis Arab yang memicu terjadinya Perang Saudara Syria sejak tahun 2011 hingga saat ini.

Kata kunci: Etnis Kurdi, diskriminasi, genosida, minoritas

Abstract - Before the country Türkiye borders were established through the Treaty of Lausanne, Ethnic Kurds from the Kurdistan Mountains lived in a nomadic state. Therefore, Ethnic Kurds are one of the minority groups in Middle Eastern countries, such as: (1) Türkiye, (2) Iraq, (3) Iran, and (4) Syria. Ethnic Kurds are not the majority in the country, so they are vulnerable to discrimination and genocide. The purpose of this study is to find out more about the life of the Kurdish Ethnic after World War I to modern times in the countries of Türkiye, Iran, Iraq, and Syria (1918-2024). This research uses historical methods with a qualitative approach. Ethnic Kurdish life in the country faces different challenges. Ethnic Kurds in Türkiye experienced genocide in 1925-1938 and 1984-1999. Ethnic Kurds in Iraq also experienced genocides in 1978-1979 and 1987-1989. In addition, the Kurds in Iran are fighting to establish a state for the Kurds in the western region of Iran. Meanwhile, the Kurds in Syria are facing a conflict with the Arabs that triggered the Syrian Civil War since 2011 until now.

Keywords: Kurds Ethnic, discrimination, genocide, minoritas

Pendahuluan

Kelompok adalah kumpulan individu yang berkumpul bersama karena memiliki karakteristik yang sama, seperti nilai-nilai, kepentingan, dan tujuan yang serupa. Kelompok dapat terbentuk secara sengaja atau secara alami berdasarkan faktor-faktor, seperti identitas, kepentingan bersama, atau lokasi geografis. Kelompok merupakan bagian dari realitas sosial yang universal dan struktur sosial di suatu negara (Flamino et al., 2021, p.1). Salah satu jenis kelompok adalah kelompok minoritas.

Kelompok minoritas merupakan kelompok yang mempunyai jumlah anggota yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok mayoritas dalam suatu negara atau komunitas. Kelompok minoritas memiliki ciri khas atau identitas tertentu yang membedakan mereka dari kelompok mayoritas dalam suatu negara, seperti agama, bahasa, budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu, kelompok minoritas rentan mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak adil dari kelompok mayoritas. Kelompok minoritas dapat terbentuk karena faktor tertentu, seperti sejarah, mobilitas geografis, atau kebijakan pemerintah (United Nations Human Right Office of the High Commissioner, 2010, p.5). Contoh dari kelompok minoritas yang sering kali mengalami perlakuan tidak adil dari kelompok mayoritas adalah Etnis Kurdi.

Etnis Kurdi adalah salah satu kelompok etnis yang memiliki sejarah panjang di wilayah Asia Barat. Mereka berasal dari wilayah Pegunungan Kurdistan di Asia Barat. Sebelum Perang Dunia I, Etnis Kurdi hidup secara nomaden atau berkelana dari satu wilayah ke wilayah lain. Akibat gaya hidup nomaden tersebut, saat ini Etnis Kurdi tersebar di Türkiye bagian tenggara, Irak bagian utara dan timur, Iran bagian barat laut dan utara, dan Syria bagian utara (Zilan, 2017, p.1).

Etnis Kurdi tidak menjadi mayoritas di suatu negara tertentu, sehingga mereka sulit memiliki kewarganegaraan. Setelah berakhirnya Perang Dunia I dan runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah, Blok Entente (Inggris dan Perancis) yang berhasil memenangkan Perang Dunia I, mengadakan referendum yang dijadwalkan untuk mempertimbangkan pendirian Negara Kurdistan bagi Etnis Kurdi. Hal ini dilakukan melalui Perjanjian Sèvres pada tahun 1920 dan diharapkan dapat segera direalisasikan. Tiga tahun setelahnya, janji akan referendum tidak ditepati. Hal ini disebabkan Perjanjian Lausanne yang berisi tentang penetapan batas-batas Negara Türkiye setelah perang kemerdekaan Türkiye yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk dan janji referendum untuk Etnis Kurdi tidak pernah direalisasikan (Bengio, 2014, pp. 137-138). Oleh karena itu, Etnis Kurdi memiliki status minoritas di negara Asia Barat, seperti Türkiye, Irak, Iran, dan Syria.



Gambar 1. Peta Persebaran Etnis Kurdi
(Warna Hitam)

Dokumentasi: The Political Geography
of Kurdistan

Etnis Kurdi di negara Türkiye telah lama menghadapi tekanan dan diskriminasi, terutama setelah genosida yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1923. Adapun di negara Irak, Etnis Kurdi mengalami genosida selama perang Iran dan Irak (1980-1988 M) pada masa pemerintahan Saddam Hussein. Selama perang tersebut, banyak Etnis Kurdi menjadi korban kematian massal akibat serangan gas beracun yang dilakukan oleh Tentara Irak. Situasi yang serupa juga dialami oleh Etnis Kurdi di negara Iran, mereka sering kali menghadapi diskriminasi karena dianggap sebagai kelompok minoritas, baik pada masa pemerintah Dinasti Pahlavi maupun pemerintah Ayatollah Ruhollah Khomeini. Selain itu, Etnis Kurdi yang berada di Syria juga mengalami penganiayaan dari Etnis Arab yang memicu pecahnya Perang Saudara Syria pada tahun 2011. (Bengio, 2014, pp. 269-270).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kehidupan Etnis Kurdi pasca Perang Dunia I hingga masa modern di Negara Türkiye, Irak, Iran, dan Syria (1918-2024). Perbedaan pokok dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu analisis yang lebih komprehensif mengenai diskriminasi Etnis Kurdi di Negara Türkiye, Irak, Iran, dan Syria, terutama dalam konteks karya ilmiah berbahasa Indonesia yang masih sedikit pembahasan terkait Etnis Kurdi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan judul penelitian yaitu Diskriminasi Etnis Kurdi di Türkiye Irak Iran dan Syria Tahun 1918-2024.

Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan sebagai metode penelitian untuk menggali dan memahami makna dari suatu fenomena atau peristiwa secara menyeluruh (Wiratama, 2022, p.35). Pendekatan ini lebih menekankan pada interpretasi dan pemahaman yang bersifat subjektif. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berusaha untuk memahami konteks, persepsi, dan fenomena yang sedang diteliti (Pratama et al., 2023, p.193). Tujuan dari pendekatan kualitatif adalah untuk mendapatkan informasi yang sangat rinci. Selain itu, pengumpulan data yang dilakukan dalam pendekatan kualitatif yang sangat mendalam akan meningkatkan kualitas hasil penelitian (Rohmah et al., 2022, p.960). Salah satu jenis pendekatan kualitatif adalah metode sejarah.

Metode sejarah adalah sebuah pedoman yang diaplikasikan oleh peneliti untuk mempelajari peristiwa masa lalu (Gottschalk dalam Wiratama et al., 2021, p.130). Proses ini melibatkan pengumpulan bukti terkait peristiwa masa lalu, penilaian keabsahan bukti sumber sejarah, dan interpretasi makna yang terkandung dalam dalam konteks peristiwa sejarah yang terjadi (Gottschalk dalam Widiatmoko et al., 2022, p.24). Metode sejarah juga memiliki aspek ilmiah (Kuntowijoyo, 2013, p.69). Oleh karena itu, diperlukan analisis, evaluasi kritis, dan pemikiran kritis terhadap buku-buku dan artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui literasi digital yang dapat dipercaya. Terdapat beberapa langkah dalam metode sejarah, yaitu: (1) heuristik; (2) kritik sumber; (3) interpretasi; dan (4) historiografi.

Langkah pertama dalam penelitian sejarah yaitu heuristik yang melibatkan pencarian dan penghimpunan sumber-sumber sejarah yang relevan. Proses heuristik ini mencakup identifikasi dan penemuan sumber-sumber baru yang dapat memberikan wawasan atau perspektif yang belum terungkap sebelumnya. Setelah menghimpun sumber-sumber sejarah, langkah berikutnya adalah melakukan kritik terhadap sumber-sumber tersebut. Pada langkah ini, penting untuk mempertimbangkan konteks sumber sejarah yang dibuat dan mengidentifikasi kekurangan atau manipulasi informasi yang mungkin terdapat dalam sumber sejarah. Langkah selanjutnya dalam metode sejarah yaitu interpretasi. Interpretasi melibatkan pemahaman dan analisis terhadap informasi yang terkandung dalam sumber sejarah. Langkah terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi. Proses ini mencakup penulisan dan penyajian hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis. (Kartodirdjo, 1992, pp. 1-4).

Hasil dan Pembahasan

1. Etnis Kurdi yang Tidak Berdaya di Negara Sekuler Türkiye

Sejak tahun 1923 hingga tahun 1946, wilayah Bakur yang memiliki penduduk Etnis Kurdi dikategorikan sebagai keadaan darurat militer oleh Pemerintah Türkiye karena sering terjadi pemberontakan Etnis Kurdi. Pemerintah Türkiye yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk menindas beberapa pemberontakan Etnis Kurdi yang berskala besar pada tahun 1925, 1930, dan 1938. Hal ini disebabkan, Etnis Kurdi menentang kebijakan sekularisme. Adapun kebijakan pemerintah Mustafa Kemal Atatürk, seperti larangan penggunaan bahasa Kurdi, larangan pakaian khas Etnis Kurdi, larangan budaya Etnis Kurdi, dan larangan nama Etnis Kurdi (Vezbergaite, 2015, pp.6-7). Selama rentang waktu antara tahun 1925 hingga 1938, lebih dari satu juta Etnis Kurdi mengalami genosida. Pemberontakan terakhir Etnis Kurdi yang dikenal sebagai Pemberontakan Ağrı terjadi di pegunungan Arafat pada tahun 1930 mengakibatkan genosida di wilayah tenggara Türkiye. Genosida ini menyebabkan banyak desa Etnis Kurdi hancur dan penduduk etnis tersebut melarikan diri ke negara Syria (Kasaba, 2008, pp.334-356).

Setelah terjadinya genosida tersebut, partai sayap kiri Etnis Kurdi yang dikenal sebagai Partiya Karkerên Kurdistan muncul di Türkiye pada tahun 1974. Tujuan utama dari partai ini adalah menentang kekerasan terhadap masyarakat Etnis Kurdi yang dilakukan oleh pemerintah Türkiye dan mendukung partisipasi Etnis Kurdi dalam pemilihan umum Türkiye. Tindakan yang dilakukan oleh Partiya Karkerên Kurdistan untuk mencapai tujuan tersebut dibuktikan pada tahun 1977. Pada tahun tersebut, terdapat seorang anggota Partiya Karkerên Kurdistan yang bernama Mehdi Zana berhasil memenangkan pemilihan umum sebagai walikota Diyarbakir (sebuah kota di bagian tenggara Türkiye) (Kasaba, 2008, p.348).

Pada tahun 1980, Etnis Kurdi tidak diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan dasar dan tidak mempunyai hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, meskipun Türkiye telah mengakui ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) yang berisi tentang perlindungan hak individu. Dampak dari kebijakan tersebut, Partiya Karkerên Kurdistan menjadi sebuah organisasi militan Kurdi yang berjuang dengan senjata melawan pemerintah Türkiye demi penentuan nasib sendiri

bagi Etnis Kurdi. Pemerintah Türkiye menyebut partai ini sebagai organisasi teroris, namun PBB, Swiss, Rusia, dan India tidak mengklasifikasikan Partiya Karkerên Kurdistan sebagai organisasi teroris (Novellis, 2021, p.115).

Pada tahun 1984 hingga 1999, terjadi konflik antara Partiya Karkerên Kurdistan dengan militer Türkiye yang menyebabkan perang terbuka. Perang terbuka ini membuat sebagian besar wilayah pedesaan di tenggara Türkiye menjadi tidak berpenghuni karena warga sipil Etnis Kurdi bermigrasi dari desa ke kota-kota besar, seperti Diyarbakır, Van, dan Şırnak (Kasaba, 2008, p.350). Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Türkiye telah menambah daftar kejahatan terhadap Etnis Kurdi, termasuk penyiksaan, pemerkosaan, dan penghancuran desa. Sejak tahun 1970, European Court of Human Rights telah mengutuk pemerintah Türkiye atas ribuan pelanggaran hak asasi manusia yang dilancarkan terhadap Etnis Kurdi. Keputusan tersebut terkait dengan pembunuhan warga sipil Etnis Kurdi, penyiksaan, pengusiran paksa, penghancuran desa secara sistematis, penangkapan tanpa barang bukti, dan penghilangan jurnalis Etnis Kurdi (Raimondi et al., 2013, pp.2-3).

Pada bulan Maret 1994, Leyla Zana merupakan anggota parlemen perempuan dari Etnis Kurdi yang lahir di Diyarbakır, telah menciptakan keributan di Parlemen Türkiye. Hal ini disebabkan, Leyla Zana menambahkan kalimat dalam Bahasa Kurdi ke dalam sumpah parlemennya saat upacara pelantikan anggota Parlemen Türkiye. Kalimat yang ditambahkan, yakni "Saya mengambil sumpah ini untuk persaudaraan antara orang-orang Türkiye dengan orang-orang Kurdi" (Neriah, 2012, p.15). Pada akhirnya, Parlemen Türkiye mengambil keputusan untuk mencabut status anggota parlemen Leyla Zana dan lima anggota parlemen lainnya yang berasal dari etnis Kurdi, yaitu: Hatip Dicle, Ahmet Turk, Sirri Sakik, Orhan Dogan, dan Selim Sadak. Mereka diberikan hukuman penjara selama 15 tahun oleh Mahkamah Konstitusi Türkiye pada tanggal 14 Oktober 1995. Leyla Zana kemudian dianugerahi Sakharov Prize (piagam kebebasan berpendapat) dalam perkembangan hak asasi manusia oleh Parlemen Uni Eropa pada tahun 1995. Namun, mereka akhirnya dibebaskan pada tahun 2004 setelah menerima peringatan dari lembaga-lembaga Eropa terkait penahanan anggota parlemen Etnis Kurdi akan berdampak negatif terhadap hubungan Türkiye dengan Uni Eropa (Yildiz, 2005, p.32).

Pada tahun 2000, pasukan militer Türkiye yang melakukan genosida secara resmi dilindungi oleh pemerintah Türkiye. European Court of Human Rights menuduh pemerintah Türkiye bertanggung jawab atas hilangnya 3.200 warga Etnis Kurdi dan Etnis Asiria pada tahun 1993 dan 1994. Banyak politisi, aktivis hak asasi manusia, jurnalis, guru, dan intelektual Etnis Kurdi menjadi korban dalam kejadian tersebut (Fawcett, 2001, p.114). Saat ini masih ada sebagian Etnis Kurdi yang berjuang untuk memperjuangkan hak asasi manusia mereka karena Tentara Türkiye telah membakar desa-desa di wilayah tenggara Türkiye yang menyebabkan dua juta Etnis Kurdi kehilangan tempat tinggal pada tahun 1925-1938 dan 1984-1999. Etnis Kurdi mencakup sekitar 18% dari total populasi di Türkiye (sekitar 17 juta orang) pada tahun 2023 (Zilan, 2023, p.1). Masyarakat Türkiye menyebut Etnis Kurdi sebagai Doğulu, yang berarti orang dari wilayah tenggara Türkiye (Kaya & Baldwin, 2004, p.7).

Komunitas Etnis Kurdi di Türkiye umumnya tinggal di wilayah Bakur (bagian tenggara Türkiye) dan masih menuntut keadilan di negara Türkiye.

2. Etnis Kurdi yang Menjaring Harapan di Negara Irak

Setelah Perang Dunia I, Inggris sebagai pemenang perang Dunia I menguasai Irak berdasarkan Mandate for Mesopotamia dari LBB (Liga Bangsa-Bangsa). Mandate for Mesopotamia berisi tentang Inggris yang diberi mandat oleh LBB (Liga Bangsa-Bangsa) untuk mengelola wilayah Timur Tengah pasca keruntuhan Ottoman hingga wilayah tersebut mengalami stabilitas sosial. Ketika Inggris menjalankan Mandate for Mesopotamia di Irak, Inggris menghadapi tantangan yang besar dalam menghadapi kelompok Etnis Kurdi dari Ahmed Barzani pada tahun 1927. Etnis Kurdi ini menginginkan pembentukan negara Etnis Kurdi di Irak utara dan mengajukan tuntutan kepada LBB (Liga Bangsa-Bangsa) untuk membentuk pemerintahan Etnis Kurdi yang independen di Irak utara. Namun, tuntutan tersebut tidak mendapatkan respon dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB).

Sebagai tanggapan terhadap aksi yang dilakukan oleh Etnis Kurdi, Inggris kemudian mendeklarasikan Kerajaan Irak dengan Raja Faisal I bin Al-Hussein pada tahun 1931 dengan harapan dapat meredam pemberontakan antar etnis, termasuk Etnis Kurdi. Setelah mendeklarasikan Kerajaan Irak, Inggris meninggalkan wilayah Irak dan harapan Etnis Kurdi untuk membuat Negara di Irak utara menjadi gagal. Setelah pembentukan Kerajaan Irak terjadi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh Etnis Kurdi yang dipimpin oleh Ahmed Barzani. Pemberontakan ini berhasil digagalkan hanya dalam waktu kurang lebih satu bulan (Dahlman, 2002, p.286). Perjuangan Ahmed Barzani kemudian dilanjutkan oleh anaknya, Mustafa Barzani.

Selama Perang Dunia II, Etnis Kurdi di Irak memanfaatkan kekosongan kekuasaan untuk melakukan pemberontakan di wilayah Irak utara. Pemberontakan ini dipimpin oleh Mustafa Barzani dan mendapatkan dukungan dari Uni Soviet. Selama tahun 1942 hingga 1945, pemberontakan ini berhasil menguasai wilayah Kurdi dengan efektif. Namun, upaya pemberontakan ini akhirnya digagalkan oleh pemerintah Kerajaan Irak yang didukung oleh Inggris. Kegagalan ini memaksa Mustafa Barzani untuk mengasingkan diri di Iran pada tahun 1945 dan turut serta dalam pendirian Republik Mahabad di Iran bersama dengan penduduk Etnis Kurdi. Setelah Republik Mahabad runtuh, Mustafa Barzani kemudian melarikan diri ke Uni Soviet (Anderson, 2021, p.41).

Setelah terjadinya kudeta militer oleh kaum nasionalis Arab pada tanggal 14 Juli 1958 yang menggulingkan Monarki di Irak dengan raja terakhirnya yaitu Raja Faisal II, Mustafa Barzani diundang oleh Abdul Karim Qasim untuk kembali dari pengasingan di Uni Soviet. Mustafa Barzani disambut sebagai pahlawan oleh Abdul Karim Qasim. Abdul Karim Qasim merupakan salah satu tokoh kaum nasionalis Arab yang berhasil menggulingkan pemerintahan Raja Faisal II dan menjabat sebagai perdana menteri Irak pada tanggal 14 Juli 1958 (Saeed & O'Sullivan, 2006, p.7). Pertemuan antara Mustafa Barzani dan Abdul Karim Qasim bertujuan untuk memberikan otonomi daerah khusus kepada Etnis Kurdi di bagian utara Irak dengan syarat Mustafa Barzani harus meyakinkan warga Etnis Kurdi untuk mendukung kebijakan pemerintah Abdul Karim Qasim (Hassanpour, 1992, p.103). Hasil

pertemuan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, tetapi pada tahun 1960 Abdul Karim Qasim tidak memenuhi janjinya mengenai otonomi daerah khusus bagi Etnis Kurdi. Hal ini menyebabkan Mustafa Barzani memutuskan untuk memberontak dengan mendirikan organisasi Yekêtîy Nîştîmanîy Kurdistan dalam tujuan untuk meraih kemerdekaan di wilayah Irak utara. Menanggapi hal tersebut, Abdul Karim Qasim kemudian menghasut Etnis Baradost dan Etnis Zebari untuk melawan Etnis Kurdi yang berujung pada perang antar etnis Irak pada akhir tahun 1960 hingga awal tahun 1961. Hasil perang antar etnis Irak (1960-1961) adalah Etnis Kurdi berhasil memenangkan perang tersebut.

Pada bulan Februari 1961, Mustafa Barzani berhasil mengalahkan kekuatan pemerintah Abdul Karim Qasim di Irak utara dan mengkonsolidasikan posisinya sebagai pemimpin Etnis Kurdi. Pada saat itu, Mustafa Barzani menginstruksikan pasukannya untuk menguasai dan mengusir pejabat pemerintah Abdul Karim Qasim dari seluruh wilayah Irak utara. Sebagai respons terhadap kejadian tersebut, Abdul Karim Qasim mulai merencanakan serangan militer ke Irak utara untuk mengembalikan kendali pemerintah Irak atas wilayah tersebut. Pada bulan Juni 1961, Yekêtîy Nîştîmanîy Kurdistan mengeluarkan peringatan kepada Abdul Karim Qasim yang berisi keluhan dari Etnis Kurdi dan menuntut agar bahasa Kurdi menjadi bahasa legal di wilayah mayoritas Kurdi. Namun, Abdul Karim Qasim tidak memedulikan tuntutan Etnis Kurdi dan melanjutkan rencana untuk merebut wilayah Irak utara (Hassanpour, 1992, p.106).

Pada tanggal 10 September 1961, ketika pasukan Irak disergap oleh pasukan Etnis Kurdi, Abdul Karim Qasim mengecam aksi tersebut dan menginstruksikan Angkatan Udara Irak untuk mengebom desa-desa Etnis Kurdi. Tindakan ini menyebabkan seluruh penduduk Etnis Kurdi memberikan dukungan besar terhadap Mustafa Barzani. Sementara itu, Abdul Karim Qasim memiliki ketidakpercayaan yang mendalam terhadap Angkatan Darat Irak yang sengaja tidak dipersenjatai secara maksimal sehingga pemerintah Abdul Karim Qasim tidak mampu meredam pemberontakan yang dilakukan oleh Etnis Kurdi. Padahal alasan pemberontakan tersebut tidak bisa diredam adalah Abdul Karim Qasim menerapkan kebijakan penjatahan amunisi. Kondisi ini menyebabkan ketegangan antara faksi-faksi kuat di dalam militer dan dianggap sebagai salah satu alasan utama terjadinya kudeta Ba'ath terhadap Abdul Karim Qasim pada bulan Februari 1963. Pada bulan November 1963, setelah terjadi pertikaian antara kelompok politik Abdul Karim Qasim dan militer Ba'ath, kelompok militer Ba'ath berhasil menggulingkan pemerintah Abdul Karim Qasim melalui kudeta yang dipimpin oleh Abdul Salam Arif. Dalam perkembangan selanjutnya, Abdul Salam Arif menyatakan gencatan senjata pada bulan Februari 1964 antara pemerintah Irak dengan kelompok Etnis Kurdi (Hassanpour, 1992, p.116).

Setelah Abdul Salam Arif meninggal, posisi kekuasaan pemerintah Irak berpindah kepada saudaranya yang bernama Abdul Rahman Arif dan pemerintah Irak melakukan upaya terakhir untuk mengalahkan kelompok Etnis Kurdi. Namun, upaya ini tidak berhasil karena pasukan Mustafa Barzani berhasil melumpuhkan Tentara Irak secara telak dalam Pertempuran Gunung Handrin yang berada di wilayah Rawandiz pada bulan Mei 1966. Dalam pertempuran ini, kelompok Etnis Kurdi berhasil membunuh seluruh brigade Tentara Irak (O'ballance, 1973, p.116). Setelah menyadari bahwa

melanjutkan kampanye ini adalah sia-sia, Abdul Rahman Arif mengumumkan deklarasi perdamaian pada bulan Juni 1966 antara pemerintah Irak dan Etnis Kurdi. Namun, deklarasi ini tidak dilakukan karena Abdul Rahman Arif digulingkan dalam kudeta tahun 1968 dan kampanye militer untuk meredam pemberontakan Etnis Kurdi kembali dilanjutkan. Pada tahun 1969, pemerintah Partai Ba'ath memutuskan untuk berdamai dengan Mustafa Barzani dan memberikan otonomi khusus kepada Etnis Kurdi di wilayah Irak utara pada bulan Maret 1970.

Pada tahun 1973, Amerika Serikat melakukan perjanjian rahasia dengan kelompok pemberontak Etnis Kurdi terkait pendanaan aksi pemberontakan Etnis Kurdi terhadap pemerintah Irak di Baghdad (Fawcett & Tanner, 2002, p.9). Alasan Amerika Serikat membantu Etnis Kurdi karena ditemukan ladang minyak bumi di wilayah Irak utara yang dikuasai oleh kelompok Etnis Kurdi. Sebagai respons, pemerintah Irak melancarkan serangan terhadap Etnis Kurdi pada tahun 1974 yang membuat Etnis Kurdi mengungsi di dekat perbatasan Irak dan Iran. Dalam melemahkan kekuatan kelompok Etnis Kurdi, pemerintah Irak memberitahu pemerintah Iran bahwa Irak bersedia untuk melakukan mediasi terkait garis perbatasan wilayah Irak-Iran apabila Iran melakukan penghentian bantuan pangan kepada Etnis Kurdi. Kedua negara tersebut setuju untuk melakukan mediasi bersama. Melalui mediasi Presiden Aljazair yaitu Houari Boumediene, Iran dan Irak mencapai kesepakatan pada tanggal 6 Maret 1975 yang dikenal sebagai Pakta Algier (Cordell & Wolff, 2011, p.124). Kesepakatan ini membuat Etnis Kurdi kehilangan dukungan dari Iran karena penghentian pasokan pangan ke kelompok Etnis Kurdi. Ini mengakibatkan sebagian besar Etnis Kurdi mengungsi ke Syria, termasuk Mustafa Barzani. Sementara itu, sebagian kecil pasukan Etnis Kurdi menyerah dan pemberontakan berhasil direndam.

Seiring berjalannya waktu, Partai Ba'ath dipimpin oleh Saddam Hussein yang terlibat dalam pengusiran aktif terhadap kelompok minoritas Etnis Kurdi. Pada tahun 1978 dan 1979, sekitar 600 desa Etnis Kurdi dibakar dan sekitar 200.000 warga Etnis Kurdi dideportasi yang memaksa mereka untuk bermigrasi ke Turki, Syria, dan Iran (Cordell & Wolff, 2011, p.124). Pengusiran ini dilakukan karena potensi minyak bumi di wilayah Irak utara yang mayoritas penduduknya adalah Etnis Kurdi, terutama di wilayah Kirkuk.

Saat Perang Iran-Irak berlangsung, pemerintah Irak menerapkan kebijakan diskriminasi Etnis Kurdi dan menyebabkan pecahnya perang antara Irak dengan kelompok Etnis Kurdi. Meskipun Irak mendapat kecaman dari organisasi internasional, Irak tidak mendapatkan hukuman secara serius atas aksi penindasannya, termasuk penggunaan senjata kimia terhadap Etnis Kurdi yang menyebabkan ribuan kematian (Middle East Watch Report, 1993, p.51). Kampanye Anfal merupakan tindakan genosida yang dilakukan secara sistematis terhadap Etnis Kurdi di Irak. Sejak tanggal 29 Maret 1987 hingga 23 April 1989, Kampanye Anfal semakin meluas ketika tentara Irak dipimpin oleh Saddam Hussein & Ali Hassan al-Majid terkait tindakan genosida terhadap Etnis Kurdi. Tindakan ini ditandai dengan penggunaan senjata kimia yang semakin meluas, penghancuran 2.000 desa Etnis Kurdi, dan genosida warga Kurdi di pedesaan dan kota-kota besar. Kampanye Anfal merupakan bagian dari kebijakan Arabisasi. Kebijakan Arabisasi adalah sebuah program untuk mengusir Etnis Kurdi dan

kelompok etnis lainnya untuk pergi dari wilayah yang kaya akan sumber daya minyak bumi dan menggantikan mereka dengan Etnis Arab (Middle East Watch Report, 1993, p.53).

Pada tahun 2003, Etnis Kurdi bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam menggulingkan pemerintah Saddam Hussein yang melakukan genosida terhadap Etnis Kurdi. Pasukan militer Kurdi yang disebut sebagai Peshmerga, memainkan posisi penting dalam penggulingan pemerintah Irak tersebut. Namun, kelompok Etnis Kurdi tidak mengirim pasukan Peshmerga ke Bagdad dan hanya mengirim pasukan Peshmerga di Irak bagian tengah. Peshmerga juga memilih untuk tidak terlibat terlalu dalam terkait kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mendominasi sebagian besar di Timur Tengah (Lortz, 2005, p.65). Pada tahun 2005, dibentuklah konstitusi baru Irak yang mendefinisikan negara tersebut sebagai negara federal, setelah keterlibatan Amerika Serikat di Irak. Pada tahap pembentukan konstitusi baru Irak, wilayah Negara Bagian Kurdistan Irak terbentuk, yang meliputi daerah Erbil, Sulaymaniyah, dan Duhok. Pemerintah Irak yang baru ini mengakui wilayah Negara Bagian Kurdistan Irak dan seluruh undang-undang yang telah disahkan oleh Hikümetî Herêmi Kurdistan sejak tahun 1992 (Zadeh & Kirmanj, 2017, p.588)

Ketegangan antara Negara Bagian Kurdistan Irak dan pemerintah pusat Irak semakin melonjak sepanjang tahun 2011-2012 Hal ini terkait dengan tuntutan pembagian kewenangan, produksi minyak, dan kontrol wilayah. Pada bulan April 2012, Negara Federal Kurdistan Irak meminta para pejabat pusat menyetujui tuntutan mereka atau menghadapi kemungkinan pemisahan diri dari pemerintah pusat Irak (Al Arabiya, 2012, p.1). Pada bulan September 2012, pemerintah pusat Irak mengirim pasukan ke wilayah Negara Bagian Kurdistan Irak. Hubungan menjadi semakin meningkat dengan pembentukan pusat komando baru (Komando Operasi Tigris) bagi pasukan Irak untuk beroperasi di wilayah sengketa antara pemerintah pusat Irak dan Negara Bagian Kurdistan. Pada 16 November 2012, konflik militer antara pasukan pusat Irak dan pasukan Peshmerga yang membuat dua orang tewas dan sepuluh lainnya terluka dalam bentrokan di kota Tuz Khurmato yang berada di wilayah Negara Bagian Kurdistan Irak (Tawfeeq, 2012, p.1)

Pada tahun 2014, Negara Bagian Kurdistan Irak kembali berkonflik dengan pemerintah pusat Irak terkait pengawasan teritorial, ekspor minyak, dan distribusi anggaran. Dengan meningkatnya krisis di Irak dan kekhawatiran akan keruntuhan negara tersebut, masyarakat Kurdi semakin memperdebatkan isu kemerdekaan. Pada 1 Juli 2014, Masoud Barzani mengumumkan rencana untuk melaksanakan referendum kemerdekaan dalam beberapa bulan ke depan (Agence France Presse, 2014, p.1). Pada 11 Juli 2014, pasukan Peshmerga berhasil menguasai ladang minyak di Bai Hassan dan Kirkuk yang menimbulkan ancaman dari pemerintah pusat Irak.

Referendum baru diadakan pada 25 September 2017 karena Negara Bagian Kurdistan Irak dan pemerintah pusat Irak sedang menghadapi serangan kelompok militan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) di wilayah Irak Barat. Referendum kemerdekaan Wilayah Kurdistan Irak berlangsung pada 25 September 2017 dengan 92,73% suara mendukung kemerdekaan dan melepaskan diri dari pemerintah Irak (Agence France Presse, 2017, p.1). Hasil referendum ini memicu operasi militer yang membuat

pemerintah pusat Irak mengambil alih kendali atas wilayah Kirkuk dan sekitarnya, serta memaksa Negara Bagian Kurdistan Irak untuk membatalkan referendum. Ketegangan ini memaksa Negara Bagian Kurdistan Irak untuk membatalkan referendum karena dikhawatirkan akan memicu perang saudara. Sampai saat ini, Negara Bagian Kurdistan Irak masih berupaya untuk memerdekakan diri dari pemerintah pusat Irak.

3. Perjuangan Etnis Kurdi dalam Mendirikan Negara di Wilayah Iran

Pada awal abad ke-20, seorang pemimpin Etnis Kurdi di Danau Urmia yang bernama Ismail Agha Simko Shikak, memanfaatkan situasi yang kacau setelah Perang Dunia I untuk memberontak melawan pemerintah Dinasti Qajar di wilayah Iran. Pemberontakan ini dilakukan oleh kelompok Etnis Kurdi karena mereka mengalami penindasan dan hak-hak mereka diabaikan oleh Dinasti Qajar (Gunter, 2004, p.274). Pemberontakan ini dikenal sebagai pemberontakan Simko Shikak. Akibat dari pemberontakan ini, Ismail Agha Simko Shikak berhasil mendirikan kekuasaannya di wilayah barat Danau Urmia di tahun 1918. Pada situasi yang serupa, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Reza Shah Pahlavi dalam menggulingkan Dinasti Qajar dan berhasil mendirikan Dinasti Pahlavi pada tahun 1922. Oleh karena itu, wilayah Iran terbagi menjadi dua kekuasaan besar, yakni Ismail Agha Simko Shikak dan Reza Shah Pahlavi.

Pada tahun 1922, Ismail Agha Simko Shikak gugur dalam pertempuran melawan Dinasti Pahlavi sehingga kekuasaannya berpindah tangan. Wilayah kekuasaan Ismail Agha Simko Shikak kemudian digantikan oleh Jaafar Sultan dari tahun 1922 hingga 1930. Pada masa pemerintahan Jaafar Sultan, wilayah kekuasaannya meliputi Marivan hingga wilayah utara Halabja. Pada tahun 1930, Dinasti Pahlavi berhasil menaklukkan kekuasaan Jaafar Sultan dengan mengirim pasukan berskala besar ke Oshnavieh yang merupakan pusat kekuasaan Jaafar Sultan. Setelah itu, Reza Shah Pahlavi sebagai raja pertama Dinasti Pahlavi menerapkan kebijakan keras terhadap Etnis Kurdi, yakni deportasi terhadap ratusan pemimpin Kurdi dan dipaksa mengasingkan diri ke Irak, Türkiye, Armenia, Syria, dan Azerbaijan. Selain itu, tanah milik Etnis Kurdi di wilayah barat Iran disita oleh pemerintah Dinasti Pahlavi (Misiągiewicz, 2013, p.138).

Setelah Perang Dunia II, sebuah negara Etnis Kurdi didirikan di kota Mahabad pada tahun 1946 oleh Hîzbî Dêmokratî Kurdistanî Êran dibawah kepemimpinan Qazi Muhammad dengan dukungan dari Uni Soviet. Negara ini dikenal sebagai Republik Mahabad. Republik Mahabad hanya berdiri selama kurang dari satu tahun karena tidak semua warga Etnis Kurdi di Iran mendukung pembentukan negara tersebut. Hal ini disebabkan sebagian dari Etnis Kurdi lebih memilih untuk bermigrasi ke wilayah Armenia dan Azerbaijan yang menurutnya wilayah tersebut lebih baik daripada Iran (Gunter, 2004, p.301). Hal ini memungkinkan pemerintah pusat (Mohammad Reza Syah, raja kedua Dinasti Pahlavi) untuk mengalahkan kelompok Etnis Kurdi yang mendirikan Republik Mahabad.

Setelah Revolusi Iran tahun 1979, gelombang nasionalisme Etnis Kurdi melanda di wilayah Iran barat setelah jatuhnya dinasti Pahlavi. Pada awal tahun 1979, terjadi konflik bersenjata antara kelompok bersenjata Etnis Kurdi dan pasukan pemerintah Ayatollah Ruhollah Khomeini. Pasukan

bersenjata Etnis Kurdi terdiri dari dua organisasi, yaitu *Hîzbî Dêmokratî Kurdistanî Êran* dan *Komeley Şorrişgê rrî Zehmetkêşanî Kurdistanî Êran* yang berhaluan ideologi kiri (McDowall, 2004, pp. 261-263). Konflik bersenjata ini membuat Ayatollah Ruhollah Khomeini berpidato pada bulan Desember 1979 terkait konsep etnis minoritas yang bertolak belakang dengan doktrin pembentukan negara Islam. Ayatollah Ruhollah Khomeini juga menuding Etnis Kurdi telah menyimpang dari ajaran Islam karena tidak mendukung pembentukan negara Islam di Iran. Pidato tersebut mempengaruhi semangat jihad dalam memerangi Etnis Kurdi sehingga sebagian dari Etnis Kurdi mengungsi ke Negara Azerbaijan (McDowall, 2004, p.271).

Pada tanggal 2 Desember 1996, terjadi peristiwa kematian seorang ulama terkemuka dari Etnis Kurdi yang bernama Mulla Mohammed Rabiei di Kermanshah yang ditembak oleh Tentara Republik Islam Iran. Kejadian ini memicu terjadinya bentrokan sengit antara Etnis Kurdi dan Tentara Republik Islam Iran. Akibatnya, terjadi demonstrasi di kalangan Etnis Kurdi yang kemudian menyebar ke berbagai kota di wilayah Kermanshah. Kaum nasionalis Kurdi turun ke jalan di beberapa kota, seperti Mahabad, Sanandaj, dan Urmia untuk melancarkan demonstrasi massal sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Republik Islam Iran. Namun, protes ini ditindas dengan kekerasan oleh pasukan pemerintah Republik Islam Iran dan menyebabkan kematian 20 orang dari etnis Kurdi (Bureau of Democracy Human Right and Labour, 2023, p.37).

Dalam perkembangan berikutnya, seorang aktivis Etnis Kurdi yang bernama Shivan Qaderi dan dua pria Kurdi lainnya dibunuh oleh Tentara Republik Islam Iran di Mahabad pada tanggal 9 Juli 2005. Selama enam minggu berikutnya, kerusuhan dan protes meletus di kota-kota dan desa-desa Kurdi di seluruh wilayah Iran barat, seperti Mahabad, Piranshahr, Sinne, Sardasht, Oshnavieh, Baneh, Bokan, dan Saqiz. Hal ini mengakibatkan puluhan Etnis Kurdi tewas dan terluka serta terdapat banyak Etnis Kurdi yang ditangkap tanpa ada bukti (Amnesty International, 2008, p.38). Kejadian ini memicu terbentuknya organisasi yang bernama *Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê* pada tahun 2005. Organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Etnis Kurdi di Negara Republik Islam Iran. Sebagai respons terhadap aksi *Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê*, pemerintah Republik Islam Iran mengirim pasukan ke wilayah barat Iran dan berhasil menangkap Ali Heydarian, Farhad Vakili, Mehdi Eslamian, Shirin Alam Hooli, dan Farzad Kamangar, pada tanggal 9 Mei 2010. Kelima tokoh tersebut merupakan figur berpengaruh di *Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê* dan akhirnya dieksekusi mati oleh pemerintah Republik Islam Iran (Hassan, 2010, p.1). Meskipun tokoh-tokoh tersebut telah tiada, organisasi *Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê* tetap eksis dan terus berjuang untuk meraih kemerdekaan di Republik Islam Iran.

4. Pertentangan antara Etnis Kurdi dengan Etnis Arab di Syria

Pada akhir tahun 1920, terjadi gelombang imigrasi Etnis Kurdi yang berasal dari Türkiye menuju Syria di Provinsi Jazira. Imigrasi ini dipicu oleh diskriminasi dan genosida yang terjadi di wilayah Türkiye bagian tenggara yang dilakukan oleh pemerintah Mustafa Kemal Atatürk (Choueiri,

2005, p.147). Akibat imigrasi yang semakin intensif, Etnis Kurdi menjadi mayoritas di wilayah Tigris (sekarang bernama al-Malikiyah), Qamishli, dan Mabeta. Pada saat pendudukan Prancis di Syria, Etnis Kurdi yang melarikan diri ke Syria diberikan kewarganegaraan sebagai warga negara Syria oleh pemerintah Prancis.

Menjelang kemerdekaan Negara Syria, muncul gerakan otonom baru di Provinsi Jazira di kalangan Etnis Kurdi. Figur Etnis Kurdi yang terkemuka yakni Hajo Agha, Kaddur Bey, dan Khalil Bey Ibrahim Pasha, memiliki kekhawatiran terkait persetujuan antara Etnis Kurdi dengan Etnis Arab. Hajo Agha menjabat sebagai ketua Konferensi Etnis Kurdi Syria dan juga merupakan salah satu pemimpin partai Xoybûn yang melindungi hak individu Etnis Kurdi. Hasil konferensi tersebut, yakni keinginan agar pasukan Prancis tetap berada di Provinsi Jazira setelah Syria merdeka. Hal ini disebabkan Etnis Kurdi khawatir bahwa pemerintah nasionalis Syria akan menggantikan pejabat-pejabat minoritas di Provinsi Jazira dengan Etnis Arab. Namun, permintaan ini ditolak oleh pihak berwenang Perancis (Gorgas, 2009, p.205).

Pada saat kemerdekaan Syria pada tahun 1946, Presiden Adib Al Shishakli dan perwira tinggi militer Husni Zaim berasal dari Etnis Kurdi, namun mereka tidak mengidentifikasi diri sebagai Etnis Kurdi atau berbicara dalam Bahasa Kurdi. Presiden Adib Al Shishakli bahkan menginisiasi kebijakan pelarangan budaya Kurdi (Gunter, 2004, p.205). Oleh karena itu, Osman Sabri dan Hamza Diweran mendirikan Partai Hizb Al-Dimuqrati Al-Kurdistani fi Suriya pada tahun 1957. Tujuan partai ini adalah untuk menuntut pengakuan adanya budaya Kurdi dan perubahan demokrasi. Sebagai respons terhadap tuntutan mereka, Pemerintah Syria menindas partai tersebut dengan kekerasan. Partai Hizb Al-Dimuqrati Al-Kurdistani fi Suriya tidak pernah diakui secara resmi oleh Negara Syria dan selalu beroperasi sebagai organisasi bawah tanah, terutama pasca tindakan keras pada tahun 1960 yang mengakibatkan beberapa pemimpin partai tersebut ditangkap dan didakwa terkait separatisme serta dipenjarakan (Hassanpour, 1992, p.137).

Kebijakan pemerintah Syria memicu aksi protes dari kelompok Etnis Kurdi. Pada bulan Maret 1986, ribuan orang Kurdi berkumpul di Damaskus untuk meramaikan Festival Newroz dengan mengenakan pakaian khas Etnis Kurdi sebagai bentuk protes terkait larangan budaya Etnis Kurdi. Polisi Syria sudah memperingatkan mereka bahwa pakaian khas Etnis Kurdi dilarang di Festival Newroz. Namun, ribuan orang Kurdi tidak mengindahkan peringatan tersebut sehingga Polisi Syria menembaki kerumunan festival tersebut dan menyebabkan satu Etnis Kurdi tewas (Tejel, 2009, p.65). Dalam Perkembangan berikutnya, terjadi bentrokan di Stadion Sepak Bola Qamishli pada tanggal 12 Maret 2004. Bentrokan ini menyebabkan 65 orang tewas dan lebih dari 160 orang terluka. Penyebab dari bentrokan di Stadion Sepak Bola Qamishli adalah ejekan yang dilakukan oleh suporter bola Etnis Arab terhadap Etnis Kurdi. Akibatnya, terjadi bentrokan antar etnis yang membuat sebagian besar Etnis Kurdi ditangkap oleh tentara Syria setelah bentrokan tersebut. Ironisnya, sebagian besar yang ditangkap adalah Etnis Kurdi yang tidak terlibat dalam insiden di Stadion Sepak Bola Qamishli (Macleod, 2004, p.1).

Pada tanggal 4 Februari 2011, terdapat demonstrasi Etnis Kurdi di timur laut Syria yang menuntut kasus pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) harus diselesaikan, yaitu kejadian Festival Newroz dan insiden di Stadion Sepak Bola Qamishli. Pemimpin Etnis Kurdi Syria yang bernama Mashaal Tammo ditembak mati di apartemennya oleh pria bertopeng yang diyakini sebagai agen pemerintah pusat Syria, pada tanggal 7 Oktober 2011. Keesokan harinya di kota Qamishli, Tentara Syria menembaki lebih dari 50.000 pelayat yang menyebabkan lima Etnis Kurdi tewas saat prosesi pemakaman Mashaal Tammo. Sejak itu, demonstrasi Kurdi sudah menjadi bagian rutin dari konflik di Negara Syria dan menimbulkan Perang Saudara Syria antara Etnis Kurdi dengan Etnis Arab hingga saat ini (McGee, 2012, p.1). Perang tersebut membunuh sekitar 617.000 warga sipil serta 6,7 juta mengungsi ke negara tetangga Syria. Pada bulan Oktober 2019, pemerintah Syria pusat memulai serangan ke daerah-daerah berpenduduk Kurdi di Syria utara yang menyebabkan sekitar 100.000 Etnis Kurdi melarikan diri dari daerah tersebut menuju Armenia dan Azerbaijan karena mereka takut pemerintah Syria akan melakukan pembersihan etnis (Mckay, 2019, p.1). Saat ini sebagian kecil etnis Kurdi di Syria tetap bertahan di Negara Syria yang masih terjadi perang saudara, namun sebagian besar etnis Kurdi telah mengungsi ke Armenia dan Azerbaijan.

Simpulan

Sejarah hubungan antara pemerintah Türkiye dan Etnis Kurdi telah mengalami gejolak, sejak awal pendirian negara Türkiye pada tahun 1923. Pemerintah Türkiye menerapkan kebijakan sekularisme yang keras terhadap etnis Kurdi dengan tujuan mengintegrasikan mereka ke dalam budaya Türkiye dan budaya Barat. Bahasa dan Budaya Kurdi dilarang, serta identitas Etnis Kurdi diabaikan. Dampak dari kebijakan ini adalah terjadinya genosida antara tahun 1925-1938 dan 1984-1999. Selain itu, terdapat permusuhan antara Partiya Karkerên Kurdistan dengan pemerintah Türkiye terkait genosida yang terjadi pada tahun 1925-1938 dan tahun 1984-1999 terhadap Etnis Kurdi yang dilakukan oleh pemerintah Türkiye.

Sejarah hubungan antara pemerintah Irak dan etnis Kurdi telah melewati perubahan yang cukup besar selama bertahun-tahun. Pasca Perang Dunia I Hingga Pasca Perang Dunia II, kelompok Etnis Kurdi di Irak berusaha untuk mendirikan sebuah negara yang dipimpin oleh Ahmed Barzani yang kemudian perjuangannya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Mustafa Barzani. Pada masa pemerintahan Saddam Hussein, Etnis Kurdi mengalami pengusiran dan genosida yang sistematis melalui Kampanye Anfal. Setelah rezim Saddam Hussein digulingkan pada tahun 2003, Negara Federal Irak mengalami konflik dengan Negara Bagian Kurdistan Irak terkait pembagian kekuasaan, produksi minyak, dan kontrol wilayah. Hal ini membuat terjadinya referendum Kemerdekaan Wilayah Kurdistan Irak, namun digagalkan oleh pemerintah pusat Negara Federal Irak.

Sejarah hubungan antara pemerintah Iran dan etnis Kurdi juga telah mengalami beberapa konflik. Ketika Dinasti Pahlavi berkuasa, pemerintah Iran menerapkan kebijakan deportasi terhadap ratusan pemimpin Kurdi yang kemudian dipaksa untuk mengasingkan diri ke negara-negara seperti Irak,

Türkiye, Armenia, Syria, dan Azerbaijan. Setelah Perang Dunia II, sebuah negara etnis Kurdi didirikan di kota Mahabad yang terletak di Iran pada tahun 1946 oleh Hîzbi Dêmokratî Kurdistanî Êran di bawah kepemimpinan Qazi Muhammad. Namun, negara ini hanya bertahan selama kurang lebih satu tahun. Pada tahun 1979, pemerintahan Ayatollah Ruhollah Khomeini yang berkuasa menyebarkan doktrin untuk berjihad melawan etnis Kurdi, sehingga banyak etnis Kurdi yang mengungsi ke Azerbaijan. Genosida dan diskriminasi yang terjadi di Iran mendorong terbentuknya organisasi Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê dengan tujuan untuk melepaskan diri dari Negara Republik Islam Iran hingga saat ini.

Etnis Kurdi di Syria juga mengalami perlakuan diskriminatif antara sesama etnis, terutama antara Etnis Kurdi dengan Etnis Arab. Pada masa pemerintahan Presiden Bashar al-Assad, bahasa dan Budaya Kurdi dilarang, serta identitas Etnis Kurdi dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap Etnis Kurdi, seperti insiden Festival Newroz (1986) dan insiden Stadion Sepak Bola Qamishli (2004). Namun, situasi berubah bagi Etnis Kurdi selama Perang Saudara Syria yang dimulai pada tahun 2011. Perang ini menyebabkan sekitar 617.000 warga sipil tewas dan 6,7 juta orang mengungsi ke negara tetangga Syria.

DAFTAR PUSTAKA

- Agence France Presse. (2014). Kurdish Leader: We Will Vote for Independence Soon. https://www-businessinsider-com./kurdish-leader-vote-for-independence-soon-2014-7?nr_email_referer=1&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc (diakses 10 Juni 2024).
- Agence France-Presse. (2017). Massive ‘Yes’ Vote in Iraqi Kurd Independence Referendum. https://www-rappler-com./middle-east/183594-massive-yes-vote-iraqi-kurd-independence-referendum/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc (diakses 10 Juni 2024).
- Al Arabiya. (2012). *Iraqi Kurd Leader Threatens Secession Unless Power Share Demands Met*. <https://english.alarabiya.net/articles/2012/04/26/210364> (diakses 10 Juni 2024).
- Amnesty International (2008). *Iran: Human Rights Abuses Against The Kurdish Minority*. (Reports, Amnesty International Publications, p.38).
- Anderson, G. V. (2021). Iraq and The Kurds: How The 1960s-1990s Portrayed The Future of The Kurds. *The Journal for Interdisciplinary Middle Eastern Studies*. Volume 7, No. 1, (pp. 39-64).
- Bengio, O. (2014). *Kurdish Awakening: Nation Building in a Fragmented Homeland*. Austin, USA: University Of Texas Press.
- Choueiri, Y. M. (2005). *A Companion to The History of The Middle East*. Oxford, UK: Blackwell Publishing.
- Cordell, K., Wolff, S. (2011). *Routledge Handbook Of Ethnic Conflict*. New York, USA: Routledge.
- Dahlman, C. (2002). The Political Geography Of Kurdistan. *Eurasian Geography and Economics*. Volume 43, No. 4, (pp. 271-299).

- Fawcett, J., Tanner, V. (2002). *The Internally Displaced People of Iraq*. Washington DC, USA: The Brookings Institution–SAIS Project on Internal Displacement.
- Fawcett, L. (2001). Down but Not Out? The Kurds in International Politics. *Review of International Studies*. Volume 27, No. 1, (pp. 109–118).
- Flamino, J., Szymanski, B. K., Bahulkar, A., Chan, K., Lizardo, O. (2021). Creation, Evolution, and Dissolution of Social Groups. *Scientific Reports*. Vol. 11, No. 17, (pp. 1-11).
- Gorga, J. T. (2009). Les Territoires De Marge De La Syrie Mandataire : Le Mouvement Autonomiste De La Haute Jazîra, Paradoxes Et Ambiguïtés D'une Intégration « Nationale » Inachevée (1936-1939). *Revue Des Mondes Musulmans Et De La Méditerranée*. Volume 126, No. 1, (pp. 205-222).
- Gunter, M. M. (2004). *Historical Dictionary of The Kurds*. Oxford, UK: The Scarecrow Press.
- Hassan, S. (2010). *After Ehsan Fatahiyan Another Activist Fasih Yasamani Has Been Executed*. https://canadafreepress.com/article/after-ehsan-fatahiyan-another-activist-fasih-yasamani-has-been-executed?__cf_chl_tk=kokcx9.ynuucleynavlmhfr1_7eb4ksc6hofpfenuka-1718423154-0.0.1.1-4905. (diakses 13 Juni 2024).
- Hassanpour, A. (1992). *Nationalism and Language in Kurdistan 1918-1985*. San Francisco, USA: Mellen Research University Press.
- Human Rights Practices. (2023). *Iran 2023 Human Rights Report*. (Reports, Bureau Of Democracy Human Rights And Labor, p.37).
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasaba, R. (2008). *The Cambridge History of Turkey: Turkey in The Modern World (Volume 4)*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Kaya, N., Baldwin, C. (2004). *Minorities In Turkey: Submission To The European Union And The Government Of Turkey*. London, UK: Minority Rights Group International.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Sleman, Indonesia: Tiara Wacana.
- Lortz, M. G. (2005). *Willing to Face Death: A History Of Kurdish Military Forces The Peshmerga From The Ottoman Empire to Present-Day Iraq*. (Theses, Florida State University Libraries, p.65).
- Macleod, H. (2004). *Football Fans' Fight Causes A Three-Day Riot In Syria*. https://www-independent-co-uk./news/world/middle-east/football-fans-fight-causes-a-threeday-riot-in-syria-5354766.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc (diakses 14 Juni 2024).
- Mcdowall, D. (2004). *A Modern History of The Kurds*. New York, USA: I.B.Tauris.
- Mcgee, T. (2012). *Syria's Kurds: Part of The Revolution?*. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/apr/26/syrias-kurds-part-of-revolution> (Diakses 14 Juni 2024).

- Mckay, H. (2019). Syrian Kurds Fear 'Ethnic Cleansing' After US Troop Pullout Announcement. <https://www.foxnews.com/world/syria-kurdish-turkey-troop-pullout-ethnic-cleansing-fears> (diakses 14 Juni 2024).
- Middle East Watch Report. (1993). *Genocide in Iraq: The Anfal Campaign Against The Kurds*. (Reports, Human Rights Watch, p.51).
- Misiągiewicz, J. (2013). The Kurd Issue in The Middle East. *Facta Simonidis*. Volume 1, No. 6, (pp. 127-149).
- Neriah, J. (2012). *The Future of Kurdistan: Between Turkey, The Iraq War, and The Syrian Revolt*. Israel: Jerusalem Center For Public Affairs.
- Novellis, A. (2021). The Rise of Feminism in The PKK: Ideology or Strategy?. *The Journal of Critical Global South Studies*. Volume 2, No. 1, (pp. 115-133).
- O'ballance, E. (1973). *The Kurdish Revolt: 1961-1970*. London, UK: Faber and Faber Limited.
- Pratama, A. P., Wiratama N. S., Budiono H. (2023). The Israel-Palestine Sovereignty Struggle: a Historical Review Based on Territorial Claims. *Jurnal Historica*. Vol 7, No. 2, (p.193).
- Raimondi, G., Jočienė, D., Popović, D., Sajó, A., Karakaş, I., Albuquerque, P. P. D., Keller, H. (2013). *In The Case of Benzer and Others Turkey*. Strasbourg, France: Council of Europe.
- Rohmah, I. N., Wiratama, N. S., Yatmin. (2022). Perkembangan Museum Airlangga di Kota Kediri Tahun 1991-2019. *SEMDIKJAR 5: Seminar Pendidikan Dan Pembelajaran*. Vol 5, No. 1 (p.960).
- Saeed, A., O'Sullivan C. (2006). Iraq Between Two Occupations: Observations on Iraq and The Great Powers (1933–2003). *International Relations and Security Network*. Volume 1, No. 1, (pp. 1-15).
- Tawfeeq, M. (2012). Two Dead, 10 Wounded After Iraqi, Kurdish Forces Clash in Northern Iraq. https://edition-cnn-2012/11/16/world/meast/iraq-violence/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc (diakses 10 Juni 2024).
- Tejel, J. (2009). *Syria's Kurds: History, Politics And Society*. New York, USA: Routledge.
- United Nations Human Rights. (2010). *Minority Rights: International Standards and Guidance For Implementation*. New York, USA: United Nations.
- Vežbergaite, I. (2015). Self Determination of The Kurdish People: Undermining The Unity of The «Turkish Nation»? *Institute of Federalism Working Paper*. Vol 7, No 9, (pp. 1-15).
- Widiatmoko, S., Wiratama, N. S., Budiono, H. (2022). Sejarah Perkembangan Industri Batik di Kediri. *WIKSA: Prosiding Pendidikan Sejarah Universitas Indraprasta PGRI*. Vol. 1, No. 1, (p.24).
- Wiratama, N. S. (2022). Manfaat Personal Website Sebagai Media Pembelajaran Sejarah. *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian, & Pengembangan Pendidikan Sejarah*. Vol. 7, No. 2, (p.35).
- Wiratama, N. S., Budianto, A., Afandi, Z. (2021). Perkembangan Sosialisme Di Dunia Abad Ke-19 Serta Pengaruhnya di Indonesia. *Danadyaksa Historica*. Vol 1, No. 2, (pp. 130-131).
- Yildiz, K. (2005). *The Kurds in Turkey: EU Accession and Human Rights*. London, UK: Pluto Press.

- Zadeh, Y. A., Kirmanj, S. (2017). The Para-Diplomacy of The Kurdistan Region in Iraq and The Kurdish Statehood Enterprise. *Middle East Journal*. Volume 71, No. 4 (pp. 587-606).
- Zilan, R. (2017). The Kurdish Population 2017. *Journal Kurmancî*. Vol. 36, No. 1, (pp. 12-23).
- Zilan, R. (2023). The Kurdish Population 2023. *Journal Kurmancî*. Vol. 43, No. 1, (pp. 1-11).